

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENINGKATAN KESERTAAN KB PRIA DI KELURAHAN PALLIMA KECAMATAN PONTIANAK BARAT

Oleh :
MAHMUDIN
NIM. E21111032

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak. Tahun 2015

Email : mahmudin.fisip@gmail.com

Abstrak

Permasalahan dalam penelitian ini adalah masih rendahnya partisipasi pria dalam peningkatan kesertaan KB pria. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan peningkatan kesertaan KB pria di Kelurahan Pallima. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teori Adam Smith (dalam Islamy, 2001), yaitu kebijakan yang diidealkan, kelompok sasaran, badan-badan pelaksana dan faktor lingkungan. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi pria dalam peningkatan kesertaan KB pria masih rendah. Kurangnya sosialisasi dan pelatihan khusus KB pria kepada masyarakat sehingga banyak masyarakat khususnya PUS pria tidak memahami dan cenderung bersikap apatis terhadap program KB pria, mereka menganggap program KB hanyalah untuk para istri saja. Sebagai kepala rumah tangga, para suami takut kalau mereka ikut KB akan mengganggu aktifitas mereka dalam mencari nafkah keluarga. Kondisi sosial budaya masyarakat Pallima masih terbelakang, banyak para istri tidak mengizinkan suaminya menggunakan kontrasepsi MOP karena takut suami selingkuh. Dari segi ekonomi masyarakat Pallima masih tergolong ekonomi menengah, walaupun masih ada masyarakat yang di katagorikan miskin. Untuk meningkatkan kesertaan KB pria di Kelurahan Pallima, perlu adanya sosialisasi khusus tentang program KB pria sehingga mereka mengetahui manfaat dan tujuan dari program KB pria tersebut.

Kata-kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Peraturan Presiden nomor 2 tahun 2015.

Abstract

The problem in this research is still low participation of men in family planning in increasing male participation. This study aims to identify and analyze the implementation of family planning policies to improve the participation of male birth control in pallima villages. The theory used in this research is the theory of Adam Smith (in Islamy, 2001), is idealized policy, target group, implementing organization and environmental factors. The research method used is descriptive method with qualitative approach. The results showed that male participation in family planning in increasing male's participation is still low. Lack of socialization and training about male birth control to the public, especially the couples of childbearing age of men do not understand and tend to be apathetic towards male family planning program, they consider family planning programs are for the wife. As the head of the household, the husband was afraid that if they join KB will disrupt their activities to earn a living family. Social and cultural conditions in Pallima area still underdeveloped, many wives do not allow her husband to use vasectomy (MOP) for fear of cheating husband. In terms of the local economy they belong to middle class, although there are still people who categorized poor. To increase the participation of male birth control in the Pallima area, needs special socialization about male family planning programs so that they know the benefits and purpose of man's family planning program.

Keywords : The Implementation of policy, Presidential Decree No. 2 in 2015

A. PENDAHULUAN

Program KB mempunyai arti yang sangat penting dalam upaya mewujudkan masyarakat Kalimantan Barat yang berkualitas dan sejahtera disamping program lainnya seperti pendidikan dan kesehatan. Salah satu langkah yang diambil oleh Pemerintah Kota Pontianak, Kalimantan Barat, khususnya untuk urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang menjadi perhatian adalah peningkatan kualitas dan pengendalian kuantitas penduduk.

Hingga saat ini Pemerintah Kota Pontianak, Kalimantan Barat, terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara mengencakan kembali program Keluarga Berencana (KB) yang beberapa tahun belakangan mulai ditinggalkan. Permasalahan kependudukan ini sangat erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat. Dengan membatasi jumlah anak akan berpengaruh dengan peningkatan pendidikan, yang nantinya akan mengubah sudut pandang masyarakat dalam merencanakan masa depan keluarga, sebab perencanaan yang lebih baik akan bisa mendatangkan kesejahteraan yang lebih baik juga.

Sebagai salah satu program sosial dasar, pemerintah melalui Peraturan Presiden nomor 2 tahun 2015 tentang Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN)

2015-2019, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dituntut untuk bekerja keras dalam meningkatkan kualitas perencanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di tahun 2015, guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.

Perkembangan pelaksanaan program peningkatan kesertaan KB pria di Kelurahan Pallima, Kecamatan Pontianak Barat ternyata belum seperti apa yang diharapkan. Dalam kenyataannya terdapat beberapa permasalahan yang muncul dalam implementasi program yang dilaksanakan, antara lain : operasionalisasi program yang dilaksanakan selama ini lebih mengarah kepada wanita sebagai sasaran, penyiapan tempat pelayanan, tenaga pelayanan dan juga penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk pria sangat terbatas, hampir semuanya adalah untuk wanita, demikian juga adanya prioritas penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) juga hampir semuanya untuk wanita. Kondisi demikian ini ikut mempengaruhi kemampuan dan keterampilan petugas lapangan (PLKB) dalam mengkomunikasikan dan memasarkan alat kontrasepsi bagi pria, karena kurang terbiasa dan sangat terbatasnya pilihan kontrasepsinya.

Kesertaan Pasangan Usia Subur (PUS) ber-KB dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya tingkat pendidikan suami, tingkat pendidikan istri, jumlah anak yang dimiliki, jenis pekerjaan, penerimaan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) serta masih adanya anggapan bahwa banyak anak banyak rezeki. Disamping faktor sosio demografi tersebut diatas juga dapat dipengaruhi oleh mekanisme operasional pelaksanaan program KB.

Pencapaian peserta KB aktif dan partisipasi pria dalam program Keluarga Berencana Kelurahan Pallima masih rendah jika dibandingkan dengan pencapaian semua kelurahan yang ada di Kecamatan Pontianak Barat. Hal ini terbukti pada bulan Desember 2014, pencapaian peserta KB pria di Kelurahan Pallima, Kecamatan Pontianak Barat sama dengan bulan April 2015 yaitu MOP sebanyak 25 akseptor dan Kondom sebanyak 31 akseptor.

Dengan pencapaian peserta KB Aktif pria yang konstan, Pemerintah Kelurahan Pallima dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana harus benar-benar serius dalam menangani program KB pria ini. Sebab bagaimanapun program KB bukanlah hanya untuk istri saja dan peran serta suami sangatlah dominan dalam merencanakan kelahiran dan jumlah anak.

Mengacu dari indikasi masalah yang terjadi maka Pemerintahan Kelurahan

Pallima perlu melakukan terobosan strategi yang baik dan tepat untuk meningkatkan keikutsertaan lapisan masyarakat untuk menunjang pelaksanaan program KB dalam upaya meningkatkan keikutsertaan masyarakat khususnya partisipasi pria dalam ber-KB, diantaranya adalah mengikutsertakan masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, institusi yang terkait, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada evaluasi dengan memanfaatkan forum yang ada.

B. KAJIAN TEORI

Menurut Grindle (dalam Samudra, 1994:22-24) : “Implementasi kebijakan pada dasarnya ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks kebijakan”. Isi kebijakan menunjukkan kedudukan pembuat kebijakan sehingga posisi kedudukan ini akan mempengaruhi proses implementasi kebijakan, konteks kebijakan ini meliputi kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor-aktor yang terlibat.

Menurut (BKKBN, 1998:8), Mekanisme kerja program KB Nasional adalah satu rangkaian kegiatan yang satu dengan yang lainnya berkaitan dan berlangsung secara terus menerus serta berkesinambungan dengan melibatkan seluruh potensi kelurahan/desa, dalam upaya mencapai sasaran program KB

Nasional secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka kegiatan yang harmonis, saling isi dan saling melengkapi.

Adapun Tachjan (2006:26) menjelaskan tentang unsur-unsur dari implementasi kebijakan yang mutlak harus ada, yaitu :

1. Unsur pelaksana.

Unsur pelaksana adalah implementor kebijakan yang diterangkan Dimock & Dimock (dalam Tachjan, 2006i:28) sebagai berikut : “Pelaksana kebijakan merupakan pihak-pihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakan manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian”.

2. Adanya program yang dilaksanakan.

Suatu kebijakan publik tidak mempunyai arti penting tanpa tindakan-tindakan riil yang dilakukan tanpa program, kegiatan atau proyek.

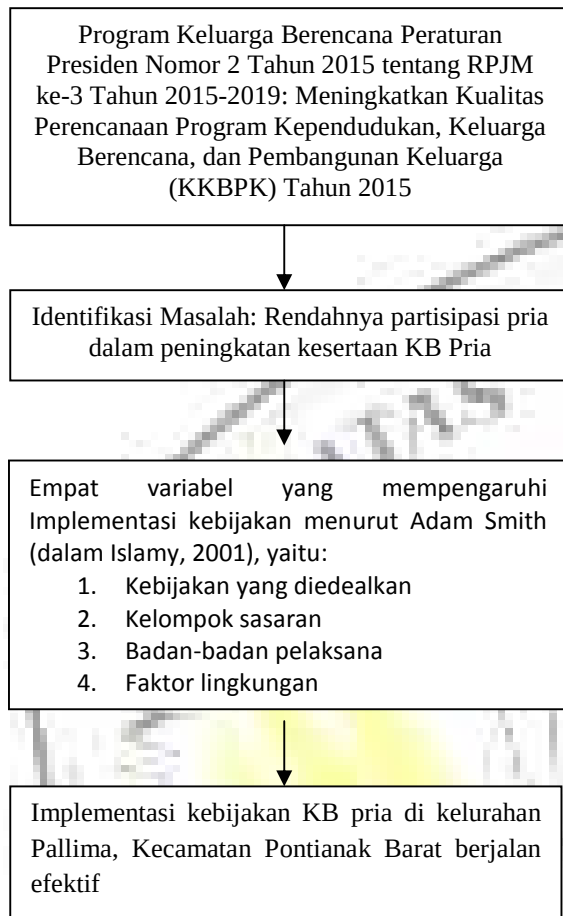
3. Target group atau kelompok sasaran.

Unsur yang terakhir adalah target groups atau kelompok sasaran, Tanhjan (2006:35) mendefenisikan bahwa :“*target groups* yaitu sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang atau jasa yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan”.

Menurut Smith (dalam Islamy, 2001), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yaitu :

- a) *Idealized policy* : yaitu pola interaksi yang digagas oleh perumus kebijakan dengan tujuan untuk mendorong, mempengaruhi dan merangsang target group untuk melaksanakannya.
- b) *Target group* : yaitu bagian dari *policy stake holders* yang diharapkan dapat mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan. Karena kelompok ini menjadi sasaran dari implementasi kebijakan, maka diharapkan dapat menyesuaikan pola-pola perilaku dengan kebijakan yang telah dirumuskan.
- c) *Implementing organization* : yaitu badan-badan pelaksana yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan.
- d) *Environmental factors* : unsur-unsur didalam lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan seperti aspek budaya, social, ekonomi, dan politik.

Kerangka Berpikir Implementasi Kebijakan Peningkatan Kesertaan KB Pria di Kelurahan Pallima Kecamatan Pontianak Barat.



C. METODE PENELITIAN

Pelaksanaan penelitian ini untuk pengumpulan data primer maupun data sekunder menggunakan metode kualitatif melalui wawancara, terutama digunakan untuk menggambarkan (*deskriptif*) dan menjelaskan (*explanatory* atau *confirmatory*) tentang proses implementasi kebijakan peningkatan kesertaan KB pria di

Kelurahan Pallima, Kecamatan Pontianak Barat.

Subjek penelitian adalah Lurah Kelurahan Pallima, Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), kader KB, akseptor KB pria, dan pria PUS yang bukan peserta KB sebagai sasaran. Sedangkan objek penelitian adalah Implementasi Kebijakan Peningkatan Kesertaan KB pria di Kelurahan Pallima, Kecamatan Pontianak Barat.

Teknik Pengumpulan Data Sugiono (2011:224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

D. HASIL PENELITIAN

1. Kebijakan yang diidealkan (*idealized policy*)

Kebijakan program peningkatan kesertaan KB pria di Kelurahan Pallima ternyata belum seperti apa yang diharapkan. Dalam kenyataannya terdapat beberapa permasalahan yang muncul dalam implementasi program yang dilaksanakan, antara lain : Operasionalisasi program yang dilaksanakan selama ini lebih mengarah

kepada wanita sebagai sasaran, penyiapan tempat pelayanan, tenaga pelayan dan juga penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk pria sangat terbatas, hampir semua adalah untuk wanita. Kondisi semacam ini sangat mempengaruhi kemampuan dan keterampilan petugas lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dalam mengkomunikasikan dan memasarkan alat kontrasepsi bagi pria, karena kurang terbiasa dan sangat terbatasnya pilihan kontrasespsinya.

Alat kontrasespsi pria yang sampai saat ini dikembangkan dan menjadi alat kontrasespsi yang dipromosikan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah Kondom dan Medis Operasi Pria (MOP), yang keduanya merupakan alat kontrasepsi yang berkategori non hormonal.

Kondom dari segi medis (dalam konteks Keluarga Berencana) merupakan alat kontrasepsi barrier (penghalang) yang bekerja dengan cara mencegah kehamilan dengan mencegah masuknya sperma ke dalam rongga rahim. Kondom terbuat dari karet tipis atau jaringan hewan (usus kambing), atau plastik (polietilen) yang dibentuk selaput buatan yang dapat membungkus penis ketika ereksi, dan dapat mencegah masuknya sperma ke dalam rahim. Yang dapat dicegah tidak hanya sperma tetapi juga bibit-bibit penyakit, karena itu dapat juga digunakan untuk

mencegah penularan Penyakit Menular Seksual (PMS) termasuk inveksi HIV.

Karena kondom merupakan alat kontrasepsi yang sangat praktis dan sederhana, untuk mendapatkannya bagi konsumen bisa melalui berbagai tempat, mulai dari Dokter Praktek Swasta, Bidan Praktek Swasta, Apotek, Toko Obat, serta beberapa super market yang kini juga banyak yang ikut memasarkannya. Sedangkan BKKBN hanya menyediakan secara gratis untuk mereka yang berkategori keluarga miskin melalui kader KB Desa, seperti Sub PPKBD dan PPKBD.

Kemudian alat kontrasepsi pria yang kedua adalah Medis Operasi Pria (MOP) atau yang dalam dunia medis dikenal dengan istilah Vasektomi. Vasektomi merupakan kontrasepsi mantap (kontap) pada pria yang bersifat ireversibel (kesuburan praktis tidak dapat dikembalikan) dengan cara memotong atau mengikat saluran spermatozoa (vasdeferent) yang berada dibawah batang kemaluan dan diatas kantong kemaluan atau scrotum, sehingga spermatozoa yang dihasilkan buah zakar tidak dapat keluar dan akan rusak setelah waktu tertentu dan diserap kembali oleh tubuh.

Tingkat kegagalan MOP atau Vasektomi menurut penelitian terbaru dalam fungsinya mencegah kehamilan lebih kurang sekitar 0,1 – 0,2 %. Adapun efek perlindungan terhadap resiko penyakit

menular seksual tidak ada sama sekali. Sedangkan efek samping yang biasa dijumpai adalah ; kadang-kadang menimbulkan rasa nyeri, atau terjadi pendarahan setelah operasi yang ditimbulkan akibat beban yang terlalu berat dan duduk terlalu lama serta infeksi pada kulit scrotum apabila operasinya tidak sesuai dengan prosedur. Disamping itu efek samping lainnya granuloma sperma, karena pada kedua ujung vasdeferent timbul benjolan kenyal dan nyeri.

Keberhasilan suatu program dalam meningkatkan kesertaan KB pria khususnya di Kelurahan Pallima, sosialisasi tentang KB pria secara khusus dan dilakukan secara rutin akan sangat mempengaruhi keberhasilan program dan menjadi factor keberhasilan suatu program yang akan dilaksanakan.

Dengan melakukan sosialisasi program peningkatan kesertaan KB pria secara khusus tentunya masyarakat khususnya pasangan usia subur (PUS) pria akan lebih mengetahui tentang program KB pria sekaligus manfaat dari program tersebut, sehingga target yang akan kita capai akan bisa terwujud.

Dengan kenyataan ini, peneliti melakukan wawancara kepada petugas lapangan KB, beliau mengatakan ;
“.....program KB dalam meningkatkan kesertaan KB pria di Kelurahan Pallima ini agak sulit, hal ini dikarenakan tidak ada

kegiatan atau sosialisasi khusus mengenai KB pria tersebut. Kami mensosialisasikan program KB secara menyeluruh, artinya semua alat kontrasepsi kami sosialisasikan ke masyarakat dan kegiatan ini kami laksanakan pada saat kegiatan posyandu. Apalagi memasuki tahun 2015 ini, target perolehan akseptor KB Baru pria belum ada, sehingga kami tidak terlalu mempermasalahkannya apakah para suami/pria mau ikut KB atau tidak. Selama ini juga belum pernah ada pelatihan-pelatihan khusus tentang KB Pria, sehingga kader-kader KB yang ada di lingkungan RT dan RW kurang mengerti dan memahami tentang program KB Pria dan sangat menyulitkan mereka dalam mensosialisasikan program KB Pria tersebut kepada masyarakat. Apalagi prioritas penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) hampir semuanya untuk wanita sehingga mempengaruhi kemampuan dan keterampilan petugas lapangan KB dalam mengkomunikasikan dan memasarkan alat kontrasepsi bagi pria.....”

Pada kesempatan lain, peneliti juga mewawancarai pak Lurah setempat, beliau mengatakan ;

“.....selama saya menjadi Lurah disini, belum pernah ada kegiatan atau sosialisasi khusus dalam meningkatkan kesertaan KB pria sehingga saya tidak mengetahui seberapa pentingnya program KB pria

untuk di sosialisasikan atau dilaksanakan. Oleh karena itu di Kelurahan Pallima ini, partisipasi pria dalam program KB masih rendah. Begitu juga partisipasi masyarakat dalam memastikan pembatasan jumlah anak dalam keluarga masih sangat rendah, ini terbukti bahwa di Kelurahan Pallima mayoritas Pasangan Usia Subur mempunyai anak lebih dari dua orang....”

Pada kegiatan posyandu, peneliti mewawancarai Petugas Pembantu KB Desa, petugas tersebut mengatakan ;
“..... dalam peningkatan kesertaan program KB Pria di Kelurahan Pallima, kami tidak pernah mengikuti sosialisasi khusus apalagi pelatihan khusus tentang program KB Pria, padahal sosialisasi tentang KB Pria sangat penting dilaksanakan dalam upaya peningkatan kesertaan KB Pria.....”

Salah satu akseptor KB Pria, beliau mengatakan ;
“..... saya ikut KB Pria atas kesadaran sendiri setelah saya mendapat penjelasan dari petugas lapangan KB, walaupun saya tidak pernah mengikuti sosialisasi khusus tentang KB Pria tapi saya yakin bahwa KB Pria mempunyai manfaat bagi keluarga kami.....”

Dari hasil wawancara diatas, peneliti berkesimpulan bahwa tidak adanya sosialisasi khusus dan pelatihan-pelatihan khusus tentang program KB Pria dalam meningkatkan kesertaan KB pria, apalagi

memasuki tahun 2015 ini belum ada target pencapaian peserta KB Baru pria, sangat mempengaruhi keberhasilan dalam Implementasi Kebijakan Peningkatan Kesertaan KB Pria di Kelurahan Pallima.

2. Kelompok Sasaran (*target groups*)

Kelompok sasaran dari program KB secara keseluruhan adalah Pasangan Usia Subur (PUS). Sedangkan kelompok sasaran dari program KB pria itu sendiri adalah pria yang sudah menikah. Berdasarkan observasi peneliti, tidak ada batasan usia dalam program KB pria, yang menjadi syarat utama adalah selama pria tersebut sudah menikah. Selain itu, pria tersebut juga harus mendiskusikan terlebih dahulu dengan pasangannya, karena program KB pria merupakan KB untuk selamanya.

Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di Kelurahan Pallima sampai bulan April 2015, sebanyak 2014 PUS, ini menunjukkan bahwa ada 2014 orang pria yang sudah menikah. Sedangkan pus pria yang sudah ber-KB hanya 25 orang yang menggunakan KB MOP dan 31 orang pria yang menggunakan KB Kondom. Jadi target groups atau kelompok sasaran program KB pria di Kelurahan Pallima sebanyak 1958 orang pria. Hal ini menunjukkan betapa kurang dan rendahnya partisipasi pria dalam program KB.

Rendahnya partisipasi pria dalam program KB dipengaruhi oleh karakteristik pria yang banyak beranggapan bahwa program KB lebih di khususkan untuk wanita. Selama wanita atau istri masih bisa ber-KB, maka tidak perlu pria yang ikut KB.

Mengenai kelompok sasaran program KB pria di Kelurahan Pallima Kecamatan Pontianak Barat, peneliti melakukan wawancara dengan pak Lurah Kelurahan Pallima, beliau mengatakan ;

“.....banyak pria yang sudah menikah tidak mengetahui tentang program KB pria khususnya Metode Operasi Pria (MOP), yang mereka tahu hanyalah menggunakan kondom sebagai alat pencegahan kehamilan. Bahkan saya sendiri kurang mengetahui apa sebenarnya manfaat dari KB pria tersebut, sehingga saya beranggapan bahwa program KB pria tidak banyak memberi manfaat bagi kaum pria (suami). Apalagi sekarang ini program KB kurang di galakkan oleh pemerintah, sehingga program KB pria khususnya sangat kurang mendapat respon dari pasangan usia subur pria.....”

Seorang bapak yang mempunyai tiga orang anak, peneliti mewawancarai dan beliau mengatakan ;

“.....saya pernah mendengar dari orang-orang ngobrol tentang KB Pria, tapi saya takut karena katanya KB pria selain memakai kondom tu, kita di operasi.

Mendengar kata-kata operasi saya menjadi takut sekali untuk ikut KB Pria, dan karena istri saya sudah ikut KB jadi cukup dia jak yang ikut KB.....”

Peneliti juga mewawancarai seorang petugas pembantu KB Desa (PPKBD), beliau mengatakan ;

“.....partisipasi pria dalam program KB Pria khususnya d Kelurahan Pallima ini sangat rendah sekali, hal ini di karenakan tidak pernah ada kegiatan khusus bagi pria dalam mensosialisasikan program KB Pria tersebut. Sehingga para suami kurang bahkan tidak mengetahui sama sekali tentang KB Pria tersebut khususnya Metode Operasi Pria. Kalaupun ada diantara para suami yang mengetahui tentang KB Pria tersebut, mereka merasa takut karena mendengar kata-kata operasi bagi pria.....”

Seorang petugas lapangan KB juga mengatakan ;

“.....banyak para suami menganggap bahwa program KB hanyalah untuk para istri saja, suami tidak perlu ikut KB. Sebagai kepala rumah tangga mereka (para suami) takut kalau mereka ikut KB akan mengganggu aktifitas mereka dalam mencari nafkah keluarga.....”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti berkesimpulan masih adanya masalah dalam kelompok sasaran. Pria cenderung bersikap apatis terhadap program KB pria. Hal ini disebabkan pengetahuan

mereka yang minim mengenai program KB pria. Ketidaktahuan akan manfaat dan tujuan dari program KB pria, menjadikan kelompok sasaran ini sulit untuk menerima program KB tersebut. Oleh karena itu, peneliti mengambil kesimpulan bahwa, kelompok sasaran ini sendiri dapat mempengaruhi Implementasi Kebijakan Peningkatan Kesertaan KB Pria di Kelurahan Pallima, Kecamatan Pontianak Barat.

3. **Badan-badan Pelaksana** **(implementing organization)**

Badan pelaksana yang paling dominan dalam program peningkatan kesertaan KB pria di Kelurahan Pallima adalah Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB). Sebab petugas lapangan KB mempunyai tugas untuk melakukan koordinasi pelaksanaan program Keluarga Berencana dengan pihak terkait yang dalam hal ini adalah : Lurah, Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD, juga Kader KB.

Aktor implementasi (badan pelaksana) sebagai peran dari pelaksana yang bertanggung jawab dalam implementasi program KB pria. Kebijakan Keluarga Berencana adalah kebijakan yang bersifat bottom up atau dari atas ke bawah. Peran pemerintah dalam implementasinya hanya di tataran rendah.

Suatu program yang telah diimplementasikan harus selalu di control. Controlling terhadap program KB di Kelurahan Pallima, walaupun tidak secara rutin dilakukan akan tetapi setiap ada kegiatan-kegiatan yang menyangkut tentang program KB, selalu dimanfaatkan oleh petugas lapangan KB beserta pihak Kelurahan untuk mengontrol terhadap program-program KB yang sudah dilaksanakan.

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan pak Lurah Pallima di ruang kerjanya, beliau mengatakan ;

“..... dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan, kami selalu bersama-sama baik dari PLKB maupun institusi masyarakat yang ada di Kelurahan Pallima ini. Begitu juga dari segi pengawasan atas kegiatan-kegiatan atau program yang sudah dilaksanakan, kami selalu sama-sama walaupun tidak rutin kami lakukan. Tapi setiap ada kegiatan ke lapangan kami selalu berusaha mengontrolnya, apakah kegiatan atau program yang sudah dilaksanakan ada perubahan kearah kemajuan atau tidak.....”

Dari hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa koordionasi dan kerjasama antara petugas lapangan KB dengan Lurah dalam program KB pria berjalan dengan baik.

Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) mempunyai tugas

melakukan koordinasi kegiatan operasional pelaksanaan program Keluarga Berencana bersama instansi pemerintah dan masyarakat di wilayah kelurahan. Petugas Lapangan KB juga yang bertanggung jawab dalam implementasi program KB pria. Oleh karena itu, peningkatan kualitas dan kuantitas petugas lapangan KB sangat mempengaruhi efektif atau tidaknya kebijakan peningkatan kesertaan KB pria khususnya di Kelurahan Pallima.

Karena program KB pria khususnya MOP merupakan alat kontrasepsi permanen, maka peran Penyuluh KB (PLKB) sebagai konselor/penyuluh atau pembimbing menjadi sangat penting. Klien harus mendapatkan penjelasan yang cukup tentang pilihan atau jenis alat kontrasepsi lain baik dari segi keuntungan maupun kerugiannya, sehingga klien betul-betul mantap dengan kesadaran sendiri menandatangani pilihan pada kontrasepsi MOP. Bentuk kesadaran penggunaan pilihan MOP harus dibuktikan dan merupakan prosedur baku pelayanan Keluarga Berencana, klien beserta istrinya harus menandatangani kartu persetujuan tindakan vasektomi sebelum pelayanan MOP dilaksanakan.

Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) di Kelurahan Pallima hanya berjumlah satu orang. Hal ini menunjukkan betapa beratnya beban yang diemban oleh seorang petugas lapangan KB

dalam mengimplementasikan program KB dalam satu Kelurahan. Dalam pelaksanaan program KB di Kelurahan Pallima, petugas lapangan KB dibantu oleh Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD, serta Kader KB.

Pada saat ada kegiatan KB di Kelurahan Pallima, peneliti melakukan wawancara kepada petugas lapangan KB, beliau mengatakan ;

“.....dalam melaksanakan kegiatan KB dilapangan, kami selalu dibantu oleh kader KB, PPKBD dan sub PPKBD. Dan untuk mengetahui apakah kegiatan-kegiatan yang telah kami laksanakan itu berhasil atau tidak, kami menggunakan tenaga kader untuk mengontrolnya,...”

Peneliti juga mewawancarai Petugas Pembantu KB Desa, beliau mengatakan ;

“.....unsur-unsur pelaksana seperti Lurah, PLKB, kader KB, PPKBD dan Sub PPKBD dalam mensosialisasi program KB selalu bersama-sama setiap ada kegiatan di lapangan yang menyangkut masalah program KB.....”

Hasil wawancara diatas menunjukan bahwa selalu ada kerjasama yang baik antara aparat Pemerintah Kelurahan, PLKB, kader KB dan institusi masyarakat dalam pelaksanaan program KB.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti berkesimpulan bahwa tidak ada permasalahan dalam badan pelaksana, walaupun petugas lapangan KB

di Kelurahan Pallima hanya berjumlah satu orang, karena Pemerintah Kelurahan Pallima dan institusi masyarakat setempat cukup mendukung program KB yang dilaksanakan.

4. Faktor Lingkungan (*environmental factor*)

Faktor lingkungan merupakan unsur-unsur didalam lingkungan yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan seperti aspek social, budaya, agama dan ekonomi. Lingkungan social, budaya, agama dan ekonomi yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari ketidakberhasilan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

Faktor sosial budaya masyarakat Kelurahan Pallima masih agak terbelakang, hal ini salah satunya disebabkan masih banyak PUS pria yang hanya tamat Sekolah Dasar dan bahkan ada yang tidak tamat SD.

Mengenai hal ini peneliti melakukan wawancara dengan petugas lapangan KB Kelurahan Pallima, beliau mengatakan ;

“.....kondisi social budaya masyarakat pallima masih terbelakang. Masih banyak masyarakat yang tidak tahu tentang KB pria khususnya MOP, mereka selalu beranggapan bahwa KB hanya untuk ibu-ibu saja. Apalagi masih banyak PUS pria yang hanya sekolah tamat SD saja.....”

Pada kesempatan lain, peneliti mewawancarai seorang ibu (kader KB), beliau mengatakan ;

“..... Saya tidak mengizinkan suami saya di operasi (maksudnya menggunakan MOP) karena takut dia selingkuh. Sebab kalau dia sudah di operasi, dia tak bisa lagi menghamili dan dia bisa bebas melakukan hubungan seksual ke wanita lain.....”

Dari hasil wawancara diatas menunjukan bahwa factor social budaya masyarakat cukup berpengaruh pada implementasi peningkatan kesertaan KB pria di Kelurahan Pallima, Kecamatan Pontianak Barat.

Sedangkan dari factor agama tidak mempengaruhi implementasi peningkatan kesertaan KB pria di Kelurahan Pallima. Hal ini terbukti dari hasil wawancara peneliti dengan salah seorang tokoh agama Pallima, beliau mengatakan ;

“.....tidak pernah saya mendengar masyarakat mengatakan bahwa KB itu haram. Di saat ada kegiatan-kegiatan KB, saya sering menanyakan mengapa bapak-bapak tidak ikut KB? Mereka mengetahui bahwa program KB itu dari segi agama tidak salah/haram, hanya mereka berpendapat kalau ibu-ibu masih bisa ber-KB, ibu sajalah yang ber-KB.....”

Berdasarkan hasil keterangan diatas, peneliti berkesimpulan bahwa factor agama tidak mempengaruhi implementasi peningkatan kesertaan KB pria di

Kelurahan Pallima, Kecamatan Pontianak Barat.

Masyarakat Kelurahan Pallima dari segi ekonomi mereka tergolong ekonomi menengah kebawah, walaupun masih ada masyarakat yang di katagorikan miskin. Dalam meningkatkan kesertaan KB pria di Kelurahan Pallima, factor ekonomi tidak mempengaruhi. Apalagi program tersebut tidak memungut biaya dari calon akseptor.

Dari aspek politik, peningkatan kesertaan KB pria di Kelurahan Pallima juga tidak berpengaruh. Sebab mereka memahami bahwa program KB pria semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan kualitas manusia. Semua ini tak lepas dari dukungan dan komitmen politis yang kuat dari berbagai lapisan masyarakat dan penerapan system manajemen KB secara baik dan konsisten hingga ke lapangan.

E. PENUTUP

a) Kesimpulan

Dari hasil pembahasan implementasi kebijakan peningkatan kesertaan KB pria di Kelurahan Pallima, Kecamatan Pontianak Barat yang dideskripsikan dari Bab I sampai dengan Bab IV dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kebijakan peningkatan kesertaan KB pria di Kelurahan Pallima, Kecamatan

Pontianak Barat belum berhasil. Hal ini dikarenakan tidak adanya sosialisasi khusus tentang program KB pria sehingga masyarakat Kelurahan Pallima kurang mengetahui tentang manfaat dan tujuan dari program KB pria tersebut.

2. Para suami cenderung bersikap apatis dan sulit menerima program KB pria sehingga kesertaan KB pria sangat rendah.
3. Peningkatan kesertaan KB pria di Kelurahan Pallima sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, dimana dari aspek sosial budaya masyarakat Kelurahan Pallima masih agak terbelakang. Dari aspek ekonomi, masyarakatnya masih tergolong ekonomi menengah kebawah.

b) Saran

1. Kebijakan peningkatan kesertaan KB pria perlu adanya sosialisasi khusus tentang program KB pria sehingga mereka mengetahui manfaat dan tujuan dari program KB pria tersebut.
2. PUS pria harus selalu diberi pemahaman pada setiap ada kegiatan-kegiatan KB di lapangan sehingga mereka akan mudah memahami dan bisa menerima program KB pria.
3. Perlunya peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam memberikan penyuluhan tentang program KB pria.

F. REFERENSI

Agustino, Leo. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta.

Arni, Muhammad, 2001, Komunikasi Organisasi, Bumi Aksara, Jakarta.

BKKBN, 2000, Pedoman penggarapan Peningkatan Partisipasi Pria dalam Program KB dan Kesehatan Reproduksi yang Berwawasan Gender, Jakarta.

Edward III, George.C 1980, Implementation Publik Policy, Congressional Quarteely Press, Washington.

Grindle, M.S. 1980. Politics and Policy Implementation in The Third World. New Jersey: Princeton University Press.

Hartanto, Hanafi. Keluarga Berencana dan Kontrasepsi. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.

Islamy, M. Irfan, 2001, Prinsip-prinsip Kebijakan Negara, Bumi Aksara, Jakarta.

Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman (1992: 16-19) Miles, M.B dan A. M. Huberman. 1992., Analisis Data Kualitatif.

Moleong. J. Lexy, 2005. Metode Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya : Bandung.

Suyono, Haryono, Menjadikan Hari Keluarga Nasional Sebagai Momentum Pemberdayaan Keluarga Kurang Mampu, Majalah Gemari, Edisi 53/Tahun VI/Juni 2005.

Tachjan, Dr.H.M.Si. 2006. Implementasi Kebijakan Publik, Bandung : AIPI

Ripley, R.B., & Grase A. Franklin. 1986. Policy Implementation and bureaucracy. Chicago: The Dorsey Press.

Wahab, Solichin, Abdul. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Negara. Jakarta : Rineka Cipta.

Republik Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019 (RPJMN), Sinar Grafika Jakarta.

....., Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, Jakarta.



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA
Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak Kotak Pos 78124
Homepage: <http://jurmafis.untan.ac.id>

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : MAHMUDIN
NIM / Periode lulus : E21111032/I
Tanggal Lulus : 10 September 2015
Fakultas/ Jurusan : ISIP / Ilmu Administrasi Negara
E-mail address/ HP : Mahmudin.fisip@gmail.com / 085650902069

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Publika*) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**):

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENINGKATAN KESERTAAN KB PRIA DI KELURAHAN
PALLIMA, KECAMATAN PONTIANAK BARAT

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- ☐ Secara *fulltex*
☒ *content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



Mengetahui/ disetujui
Pengelola Jurnal Publika
Dr. Arifin, S.Sos, M.AB
NIP. 197105021997021002

Dibuat di : Pontianak
Pada tanggal : 14 Desember 2015

MAHMUDIN
NIM. E21111032

Catatan :

*tuliskan nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(*Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique*)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)